

EVALUASI KEBIJAKAN DAN INDUSTRI HALAL NASIONAL

Tanggapan terhadap Penurunan SGIE (State of Global Islamic Economy) Index Indonesia 2025/2026

Akhmad Affandi Mahfudz
Peneliti CSED-INDEF & GB Unida Gontor

Kondisi SGIE Index Indonesia: Dari Potensi ke Tantangan

- Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia (240 juta jiwa), namun posisi di SGIE Report masih di bawah potensi
- SGIE Report 2024/2025: Indonesia naik ke posisi ke-3 Global Islamic Economy Indicator, dengan puncak di sektor halal media & rekreasi
- SGIE Report 2025/2026 Indonesia (modest fashion & Muslim friendly travel) turun ke 4: Malaysia, UAE, Arab Saudi dan Indonesia
- Namun, pertumbuhan industri halal nasional masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan
- Target pemerintah: 10 juta produk bersertifikat halal, namun realisasi masih jauh dari harapan
- BPJPH mencatat sekitar 9,6 juta produk bersertifikat (2025), namun produk impor hanya sekitar 108.657 (1% dari total)
- Kondisi ini menunjukkan gap antara potensi demografis dan kapasitas produksi halal nasional

Indonesia sebagai 'bus dengan banyak orang tapi sedikit penumpang' — potensi besar, partisipasi industri masih rendah

Faktor Penyebab Penurunan Daya Saing Industri Halal

1. Fragmentasi Tata Kelola (Fragmented Governance)
 - Koordinasi antar-kementerian lemah, menghambat kecepatan sertifikasi
2. Kompleksitas & Biaya Sertifikasi Halal bagi UMKM
 - Sekitar 65 juta pelaku usaha, 98% UMKM — mayoritas belum bersertifikat
 - Biaya, prosedur birokratis, dan literasi rendah jadi penghalang utama
3. Rendahnya Literasi Halal Nasional
 - Literasi ekonomi syariah nasional baru 28% (target 50% pada 2025)
 - Masih ada anggapan halal = isu keagamaan semata, bukan standar kualitas global
4. Ketergantungan Bahan Baku Impor
 - Bahan baku dan bahan tambahan industri pengolahan masih didominasi impor
 - Hanya 3 Kawasan Industri Halal (KIH) yang beroperasi: Cikande, Sidoarjo, Bintan

Indonesia surplus perdagangan halal, tetapi ancaman serbuan produk impor dan keterbatasan infrastruktur domestik mengancam posisi

SGIE

Kebijakan Pemerintah: Upaya dan Implementasi

- UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) — dasar hukum utama
- PP No. 42/2024: Penundaan kewajiban sertifikasi halal produk impor hingga 17 Oktober 2026
- Wajib Halal Oktober 2026: Barang gunaan (fashion, kerajinan, kulit) wajib bersertifikat
- Merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) — namun pangsa pasar masih <10%
- Pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) untuk koordinasi lintas sektor
- Program Halal On 30: Sertifikasi halal dalam 30 menit untuk UMKM
- Target BPJPH: 7 juta produk bersertifikat akhir 2025, 10 juta dalam jangka menengah
- Kolaborasi MRA (Mutual Recognition Agreement) dengan 93 lembaga halal di 62 negara

2026 = 'Tahunnya Halal' — momentum konsolidasi ekosistem halal nasional (Kepala BPJPH, Feb 2026)

Evaluasi Kebijakan: Kelemahan vs Potensi Perbaikan

KELEMAHAN KEBIJAKAN

- Regulasi tumpang tindih antar lembaga (BPJPH, MUI, Kementerian)
- Penundaan Wajib Halal produk impor (2026) menciptakan kekosongan hukum
- Biaya sertifikasi masih tinggi bagi UMKM
- Kurangnya integrasi ekosistem halal (produksi → sertifikasi → distribusi)
- Sertifikasi BPJPH belum diakui secara internasional (JAKIM, OIC/SMIIC)
- SDM halal auditor masih terbatas
- Infrastruktur digital & logistik belum merata

POTENSI PERBAIKAN

- Harmonisasi regulasi nasional & internasional
- Subsidi/gratis sertifikasi untuk UMKM
- Percepatan pembangunan KIH (Kawasan Industri Halal)
- Penguatan digitalisasi rantai pasok (blockchain, traceability)
- Kerja sama bilateral MRA diperluas ke lebih banyak negara
- Peningkatan literasi halal (kurikulum pendidikan nasional)
- Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah

Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan SGIE Index

1. INTEGRASI TATA KELOLA

- Sinkronisasi peran BPJPH, MUI, Kementerian, dan Pemda dalam satu payung kebijakan

2. AKSELERASI SERTIFIKASI UMKM

- Gratis sertifikasi halal untuk UMKM melalui APBN & CSR korporasi
- Digitalisasi proses sertifikasi end-to-end

3. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

- Perluasan KIH dari 3 menjadi minimal 10 kawasan strategis nasional
- Insentif fiskal & kemudahan perizinan bagi investor halal

4. PENGUATAN EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH

- Meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dari <10% ke 20% pada 2030
- Pengembangan instrumen pembiayaan halal untuk UMKM

5. DIPLOMASI HALAL INTERNASIONAL

- Harmonisasi standar dengan JAKIM, OIC/SMIIC, dan GSO
- Promosi produk halal Indonesia di pasar global (Timur Tengah, Eropa, Asia)

Target dan Indikator Keberhasilan (2026–2030)

- SERTIFIKASI HALAL:
 - 2026: 15 juta produk bersertifikat halal
 - 2030: 30 juta produk (termasuk 100% UMKM kuliner)
- LITERASI HALAL:
 - 2026: 50% populasi memahami konsep halal lifestyle
 - 2030: 75% literasi nasional
- EKONOMI SYARIAH:
 - Pangsa perbankan syariah: 20% pada 2030
 - Kontribusi industri halal ke PDB: USD 5,1 miliar (2025) → USD 15 miliar (2030)
- EKOSISTEM INDUSTRI:
 - Kawasan Industri Halal: 3 → 10 kawasan (2026–2030)
 - Produk halal ekspor: meningkat 200% dari level 2025
- SGIE INDEX:
 - Target: Peringkat 1–2 global pada 2030 (menggaser Malaysia/UAE)

Visi: Indonesia bukan lagi sekadar pasar produk halal, melainkan PUSAT PRODUKSI HALAL DUNIA

Kesimpulan

- Penurunan daya saing SGIE Index Indonesia disebabkan oleh gap antara potensi demografis dan kapasitas ekosistem halal nasional
- Tantangan utama: fragmentasi tata kelola, kompleksitas sertifikasi UMKM, literasi rendah, dan ketergantungan bahan baku impor
- Kebijakan pemerintah sudah berjalan (UU JPH, PP 42/2024, Wajib Halal 2026), namun implementasi masih belum optimal
- Diperlukan integrasi ekosistem halal nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan
- Indonesia memiliki modal strategis: populasi Muslim terbesar, sumber daya alam, kekuatan UMKM, dan dukungan regulasi
- Dengan reformasi tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi internasional, Indonesia mampu menjadi pusat produksi halal global
- 2026 adalah momentum kritis — 'Tahunnya Halal' — untuk transformasi fundamental industri halal nasional

TERIMA KASIH

Evaluasi Kebijakan & Industri Halal Nasional | 2026
